



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH  
LAUT MALUKU

KEGIATAN YANG BERNILAI STRATEGIS NASIONAL

I. Sentra Kelautan Perikanan Terpadu

NO.	LOKASI	PROVINSI
1.	Tahuna	Sulawesi Utara
2.	Morotai	Maluku Utara

II. Proyek Strategis Nasional

NO.	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
A.	Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional/Strategis Nasional Non Tol	
1.	Jalan Lingkar Trans Morotai	Provinsi Maluku Utara
B.	Proyek Revitalisasi Bandar Udara	
2.	Bandara Sultan Babullah, Ternate	Provinsi Maluku Utara
C.	Program Peningkatan Jangkauan <i>Broadband</i>	
3.	Palapa Ring <i>Broadband</i> di 57 Kab/Kota melalui Pola KPBU;	Lampiran II
4.	Palapa Ring <i>Broadband</i> di 457 Kab/Kota melalui Pola non-KPBU;	Lampiran II
D.	Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus	
5.	Kawasan Ekonomi Khusus Bitung	Provinsi Sulawesi Utara

6. Kawasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
6.	Kawasan Ekonomi Khusus Morotai	Provinsi Maluku Utara
E. Pariwisata		
7.	Percepatan Infrastruktur Transportasi, Listrik, dan Air Bersih untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN): Morotai	Provinsi Maluku Utara
F. Proyek Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas		
8.	Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Bitung	Provinsi Sulawesi Utara
G. Proyek Perikanan dan Kelautan		
9.	Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Talaud, Kabupaten Talaud	Provinsi Sulawesi Utara
H. Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan		
10.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Bitung	Provinsi Sulawesi Utara
11.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Provinsi Sulawesi Utara
12.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Provinsi Sulawesi Utara
13.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Minahasa	Provinsi Sulawesi Utara
14.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Provinsi Sulawesi Utara
15.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Minahasa Tenggara	Provinsi Sulawesi Utara

16. Pembangkitan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

NO.	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
16.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bolaang Mongondow	Provinsi Sulawesi Utara
17.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kepulauan Talaud	Provinsi Sulawesi Utara
18.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Provinsi Sulawesi Utara
19.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Banggai	Provinsi Sulawesi Tengah
20.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Banggai Kepulauan	Provinsi Sulawesi Tengah
21.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Banggai Laut	Provinsi Sulawesi Tengah
22.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Ternate	Provinsi Maluku Utara
23.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Tidore Kepulauan/Sofifi	Provinsi Maluku Utara
24.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Halmahera Utara	Provinsi Maluku Utara
25.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Halmahera Selatan	Provinsi Maluku Utara
26.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Halmahera Barat	Provinsi Maluku Utara
27.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pulau Morotai	Provinsi Maluku Utara
28.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Halmahera Tengah	Provinsi Maluku Utara
29.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kepulauan Sula	Provinsi Maluku Utara
30.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pulau Taliabu	Provinsi Maluku Utara

I. Interkoneksi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
I.	Interkoneksi Antar Pulau	
31.	Interkoneksi Kabel Laut/ <i>Overhead</i> Ternate–Tidore	Provinsi Maluku Utara

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Penyandang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman